

# ANALISIS FUNGSI KOORDINASI KEPALA DESA GUNA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA SIFALAE TE KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI

*By* ERNA NINGSIH LAOWO

**11**  
**ANALISIS FUNGSI KOORDINASI KEPALA DESA GUNA  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA SIFALAE TE  
KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ERNA NINGSIH LAOWO**

NIM. 2320079

**11**  
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NIAS  
2024**

## 4 BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Kepala desa memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan desa. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menggerakkan dan mengoordinasikan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses penyusunan rencana pembangunan desa yang disusun secara bertahap dan sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Menurut Afandi (2018:120) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas di antara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam bidang ilmu administrasi atau manajemen, koordinasi merupakan salah satu fungsi yang penting. Henry Fayol, Luther Gullick, dan beberapa ahli lainnya dalam ilmu administrasi atau manajemen menganggap koordinasi atau pengkoordinasian ini sebagai fungsi organik yang krusial dari administrasi atau manajemen. Dalam karya Isye Regina Altje Manoppo, dkk pada tahun 2017, fungsi-fungsi administrasi atau manajemen menurut Fayol adalah: perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, pengkoordinasian, dan pengawasan. S.P Hasibuan (2016:85) dalam kutipan Isye Regina Altje Manoppo, dkk 2017 mendefinisikan Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam

mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, dengan melakukan koordinasi yang efektif, perencanaan pembangunan juga akan menjadi efektif.

Berdasarkan aspek pembangunan tersebut, kepala desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai koordinator berbagai program dan kegiatan pembangunan di desa mengambil keputusan. Istilah "koordinasi" dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "coordination." Istilah "coordination" terbentuk dari dua kata, yaitu "co," yang berarti "bersama," dan "ordination," yang berarti "memerintah." Jadi, "coordination" dapat diartikan sebagai "memerintah bersama."

Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut, kepala desa memegang peran yang sangat vital. Dalam merencanakan suatu program pembangunan, masyarakat harus menjadi prioritas utama dan benar-benar terlibat dalam proses perencanaan tersebut. Selni Paru, dkk (2019) mengutip pendapat Soetomo (2006:7) yang menyatakan bahwa : "Dalam melakukan pembangunan infrastruktur maka masyarakat haruslah dipandang sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu untuk mencapai hasil yang diharapkan, atau pembangunan yang memanusiakan manusia, karena yang lebih penting bukan bagaimana hasilnya secara material, melainkan bagaimana prosesnya sehingga hasil tadi diperoleh, apakah sudah melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan atau tidak". Pembangunan infrastruktur adalah komponen penting dalam upaya pembangunan desa agar desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang memadai, atau setidaknya infrastruktur yang mendukung kemajuan masyarakat.

Desa Sifalaete, yang terletak di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, adalah salah satu desa yang terus berupaya meningkatkan kualitas hidup warganya melalui berbagai program pembangunan. Dalam konteks ini, peran kepala desa sebagai koordinator sangatlah krusial. Kepala desa harus mampu menggerakkan seluruh potensi yang ada di desa, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk mencapai pembangunan yang optimal.

Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksanaan fungsi koordinasi kepala desa di Desa Sifalaete masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, dan koordinasi yang kurang efektif antara berbagai pihak yang terlibat. Salah satu kendala utama yang muncul adalah ketidaksetujuan BPD dalam menandatangani surat persetujuan perencanaan pembangunan. Ketidaksepakatan ini menimbulkan dampak serius terhadap proses pembangunan di Desa Sifalaete.

Kepala Desa sebagai pemimpin utama dan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat perlu menjalin kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal. Oleh karena itu, analisis fungsi koordinasi kepala desa menjadi penting dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Desa Sifalaete.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi koordinasi kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete. Dengan memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh kepala desa dalam menjalankan fungsi koordinasinya, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memaksimalkan potensi pembangunan di desa ini.

Dari konteks masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menetapkan sebuah judul penelitian yang berjudul “Analisis Fungsi Koordinasi Kepala Desa Guna Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi”.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Koordinasi Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
2. Pembangunan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi koordinasi kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, terutama dalam konteks perencanaan pembangunan desa?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepala desa dalam melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan pembangunan di desa sifalaete kecamatan gunungsitoli idanoi?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fungsi koordinasi kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, terutama dalam perencanaan pembangunan desa.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepala desa dalam melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan pembangunan di desa sifalaete kecamatan gunungsitoli idanoi?

### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi pada pembangunan ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang konsep Fungsi Koordinasi Kepala Desa Guna Meningkatkan Pembangunan Di Desa.
2. Kegunaan Secara Praktis
  - a. Bagi desa Sifalate Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

47

Sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan, terutama mengenai fungsi koordinasi kepala desa guna meningkatkan pembangunan di desa.

b. Bagi Universitas Nias

Dapat dijadikan sebagai tambahan pembelajaran mengenai fungsi koordinasi, untuk dijadikan pedoman, sehingga dapat menambah wawasan bagi mahasiswa, dan juga Sebagai penambah referensi hasil-<sup>27</sup> hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa.

28

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih jauh khususnya seputar tentang fungsi koordinasi kepala desa guna meningkatkan pembangunan di desa.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Koordinasi

#### 2.1.1 Pengertian Koordinasi

koordinasi adalah suatu tindakan pengaturan elemen-elemen yang sangat kompleks agar semuanya bisa terintegrasi dan bisa bekerjasama secara efektif dan harmonis. Sedangkan dalam ilmu manajemen, pengertian dari koordinasi adalah berbagai aktivitas yang dikerjakan dengan tujuan untuk mengintegrasikan tujuan serta rencana kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam semua unsur (Khodijah & Putra, 2020; Putra & Isfandayani, 2020; Wijaya & Rifa'i, 2016).

Siagian (2016 : 214) mengartikan koordinasi sebagai berikut: Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin. Koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif (Maryani & Nainggolan, 2019).

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses pengaturan dan penyesuaian berbagai elemen, aktivitas, dan usaha bersama untuk mencapai kesatuan tindakan dalam upaya mencapai tujuan bersama. Koordinasi bertujuan untuk mengintegrasikan tujuan serta rencana kerja yang telah ditetapkan agar semua unsur dapat bekerja secara efektif, efisien, dan harmonis. Koordinasi yang baik memerlukan hubungan kerja yang efektif dan pembagian tugas yang terstruktur serta terintegrasi.

Menurut Sutarto (2018: 146-147), Manfaat koordinasi di dalam organisasi adalah :

1. Menghindarkan perasaan lepas antara satuan organisasi atau antara pejabat di dalam organisasi.



2. Menghindarkan pendapat bahwa organisasinya atau jabatan adalah sesuatu yang paling penting.
3. Dengan koordinasi dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya pertentangan antara satuan organisasi atau antara pejabat.
4. Koordinasi dapat menghindarkan dari terjadinya rebutan fasilitas.
5. Menghindarkan kemungkinan terjadinya kesamaan pekerjaan atas suatu
6. aktivitas oleh satuan organisasi atau kesamaan pengerjaan terhadap tugas para pejabat.
7. Mencegah kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap tugas para pejabat.
8. Menumbuhkan kesadaran di antara pejabat untuk saling membantu terutama di antara pejabat yang berada di dalam satuan organisasi yang sama.
9. Menumbuhkan kesadaran diantara pejabat untuk saling memberitahu permasalahan yang dihadapi bersama sehingga dapat menghindari terjadinya keselamatan bagi dirinya atas kerugian pejabat lainnya.
10. Menjamin adanya kesamaan langkah antar pejabat.
11. Dengan adanya kordinasi dapat menjamin adanya kesamaan tindakan antar pejabat.

42

### **2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Koordinasi**

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi Menurut Hasibuan (2007: 88), terdapat faktor faktor koordinasi yaitu :

#### **1. Kesatuan Tindakan**

Pemimpin menyediakan fokus dan arah, serta jaminan sukses dalam menyelesaikan tugas. Komitmen ini dapat dicapai dengan mengambil fokus yang tepat, membuatnya sederhana, menjadikan tindakan sebagai orientasi dan membuat penting sebuah tugas. Hal tersebut membutuhkan kemampuan pemimpin dalam mengatur jadwal dan pembagian waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan sukses dan sesuai dengan rencana.

#### **2. Hubungan Kerja**

Komunikasi dalam hubungan kerja tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Berkomunikasi hubungan kerja dibutuhkan perantara atau fasilitas untuk mendukung berjalannya komunikasi agar menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien.

#### **3. Pembagian Kerja**

Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih dari pada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dan

efektif dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.

#### 4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Untuk itu diperlukan disiplin. Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Tidak hanya untuk mencapai disiplin waktu bekerja dan perilaku, tetapi juga mencakup disiplin anggaran untuk mencapai hasil optimal dalam mencapai tujuan organisasi.

### 2.1.3 Strategi Meningkatkan Koordinasi

Untuk mengukur koordinasi internal oleh Kepala Desa maka digunakan teori menurut Arifin dan Muhammad (2016:68):

#### a. Prinsip Kontak Langsung

Prinsip ini menyatakan bahwa koordinasi harus dicapai melalui hubungan antar manusia baik hubungan secara horizontal maupun vertikal. Dalam hubungan langsung tersebut dapat terjadi pertukaran gagasan, pendapat, harapan dan sebagainya. Semua pendapat bisa dikemukakan secara lebih detail sehingga memungkinkan untuk diperolehnya saling pengertian yang mendalam.

#### b. Prinsip Penekanan pada Pentingnya Koordinasi

Kurang baiknya koordinasi yang ada dapat menimbulkan kesimpangsiuran di dalam organisasi. Selain itu, koordinasi yang baru diadakan kemudian juga dapat menghambat jalannya organisasi. Oleh karena itu koordinasi perlu dilakukan sejak membuat perencanaan sampai pada melaksanakan kebijakan.

#### c. Hubungan Timbal Balik di antara Faktor faktor yang ada

Masing-masing individu yang bekerja bersama-sama dalam kondisi pekerjaan tertentu, akan saling memberikan pengaruh antara yang satu dengan yang lainnya. Kondisi, tujuan dan macam pekerjaan yang sama memungkinkan bagi mereka untuk mengadakan hubungan secara rutin, baik di dalam bagian maupun di luar bagian.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ini dapat menghasilkan peningkatan kualitas koordinasi dalam sebuah tim atau organisasi, yang pada gilirannya membawa manfaat dalam hal efisiensi, produktivitas, dan pencapaian tujuan bersama.

### 2.1.4 Indikator Koordinasi

Menurut Soewarno Handyaningrat (Triyono dan Yuniarsih 2020)

Yakni:

- 1) Komunikasi,
- 2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi,
- 3) Partisipan,
- 4) Kesepakatan,
- 5) Komitmen,
- 6) Kontinuitas perencanaan.

48

## 2.2. Pembangunan

### 2.2.1 Defenisi Pembangunan Desa

Siagian (2018:66) menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Sedangkan Suharno (2019:45) mendefinisikan pembangunan desa sebagai serangkaian kegiatan yang dirancang dan diimplementasikan untuk mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya desa dengan tujuan menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.

51

dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Proses ini mencakup pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya desa, dengan tujuan utama menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Kedua ahli sepakat bahwa upaya yang berkesinambungan sangat penting untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan dalam komunitas desa.

4

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan

pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Adapun tujuan pembangunan desa, adalah: (1) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan kabupaten; (2) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan; (3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman, dan sehat; (4) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perbatasan; (5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah; (6) Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah; dan (7) Pembangunan perdesaan.

### 2.2.2 Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa

Agar pembangunan di desa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan serta pengembangannya. Berikut penjelasan ketiga unsur menurut Rahardjo Adisusmito (2006:18-20):

A Prinsip-prinsip pembangunan pedesaan, antara lain :

- 1) Transparasi.
- 2) Partisipatif.
- 3) Dapat dinikmati masyarakat.
- 4) Dapat dipertanggungjawabkan, dan
- 5) Berkelanjutan.

B Sasaran pembangunan pedesaan, adalah untuk terciptanya :

- 1) Peningkatan produksi dan produktifitas.
- 2) Percepatan pembangunan desa.
- 3) Peningkatan ketrampilan dalam berproduksi, pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.
- 4) Peningkatan prakarsa, dan
- 5) Penguatan kelembagaan.

C Ruang lingkup pengembangan desa, yaitu:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana.

- 2) Pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- 4) Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan, dan
- 5) Penataan keterkaitan antara kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan.

Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu juga memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam berbagai teori yang akan digunakan di dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Sehingga biasanya, penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai landasan teori karena memiliki kaitan yang erat dengan penelitian lain yang relevan dan dapat digunakan di dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, akan diuraikan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Metode	Hasil / kesimpulan
1	Muh Rinto, 2021	Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar	Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan informan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan yaitu bentuk kerjasama, kesatuan

			<p>3</p> <p>sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa; Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan Wawancara terhadap informan</p>	<p>3</p> <p>tindakan, dan komunikasi. koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa menunjukkan koordinasi yang baik, hanya saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Laikang belum maksimal terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik terdiri dari; a). Faktor pendukung koordinasi yaitu masyarakat dan Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa; b). Faktor penghambat koordinasi yaitu sarana, pola komunikasi, tidak memahami fungsi dan Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD</p>
2	M 8 aslikan 2020	FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ( STUDI DI DESA KRANDON KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS )	Menggunakan metode penelitian kualitatif penulis menggali lebih dalam bagaimana fungsi BPD itu sebenarnya di Desa Krandon ini.	Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa Krandon ini kurang optimal dan dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan BPD sangat berpengaruh dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara pemerintah Desa dan BPD, serta harus adanya penambahan anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang operasionalnya.

	<p>26</p> <p>N Nurlinah 2019</p>	<p>Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa</p>	<p>6</p> <p>metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa meliputi Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dimana selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa sehingga berjalan dengan baik dalam proses tersebut, Kemudian dari Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.</p>
--	--------------------------------------	---	---	--

4	Diana	Koordinasi BPD	Metode	Hasil penelitian yang
---	-------	----------------	--------	-----------------------

	Mahmuda 2022	<p>9 dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang</p>	<p>9 penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menekankan pada teori koordinasi yang terdiri dari kerja sama, kesatuan tindakan, dan komunikasi beserta penekanan teori political will menurut Brinkerhoff</p>	<p>ditemukan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa dalam proses pembentukan Perdes di Desa Cileles serta mengetahui political will atau komitmen seperti apa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam menghadapi fenomena masalah yang terjadi sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi.</p>
5	Nurfadillah, M., & Fatimah, S. (2022)	<p>5 ANALISIS PELAKSANAAN KERJASAMA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI PADA DESA SARI MULYA KECAMATAN SUNGAI LOBAN KABUPATEN TANAH BUMBU)</p>	<p>Metode atau pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian digunakan cara : Wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Teknik analisa data digunakan kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu selama ini belum maksimal. (2) Pelaksanaan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban</p>



				<p>Kabupaten Tanah Bumbu seharusnya ditempuh dengan cara :</p> <p>(a) Mengerti dengan baik tujuan dalam melaksanakan tugas, (b) Bekerja secara terbuka, (c) Dorongan untuk mengembangkan keterampilan kerja, (d) Berusaha memecahkan konflik, (e) Berpartisipasi dalam mendelegasikan tugas-tugas organisasi.</p>
6	<p>20 Immanuel N. Tadanugi (2018)</p>	<p>PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAMONJENGI KECAMATAN MORI KABUPATEN MOROWALI UTARA</p>	<p>7 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif sedangkan jumlah responden yang di ambil adalah 19 Orang.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Tamonjengi dari peningkatan partisipasi, pembinaan dan koordinasi dapat terlaksana dengan baik, hal ini di sebabkan karena dilibatkannya semua unsur masyarakat Desa melakukan beberapa variable tersebut, Oleh karena itu peranan kepala desa sangatlah berpengaruh akan suksesnya pembangunan terutama dalam pemberdayaan masyarakat di desa itu, serta dukungan dari</p>

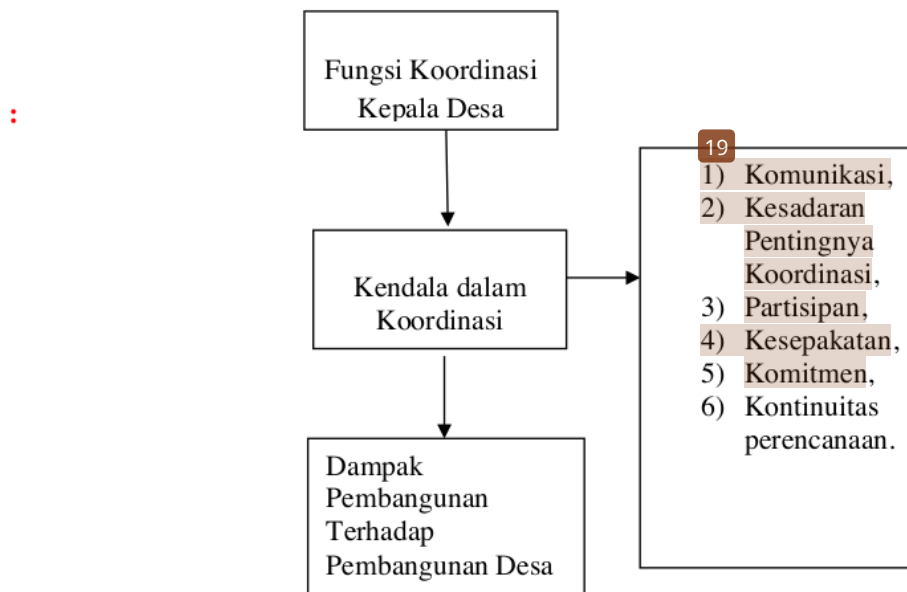
				masyarakat harus benar-benar ada sehingga semua kegiatan-kegiatan pemerintahan desa dapat terlaksana dengan baik.
7	Isye Regina Altje Manoppo, Dkk (2017)	<sup>1</sup> FUNGSI KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buise belum terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang belum terlaksana secara menyeluruh. Koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buise, tidak hanya dapat membantumeningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi dapat memberi dampak pada perkembangan desa Buise. Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan disebabkan karena adanya konflik yang terjadi antara kepala desa dengan ketua MTK (Majelis Tua-Tua Kampung) karena itu pemerintah desa buise

				sendiri harus bisa dengan segera menyelesaikan masalah yang ada.
8	Selni Paru (2019)	PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SALIBABU KECAMATAN SALIBABU	de Penelitian Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang pada akhirnya akan memberikan gambaran faktual mengenai peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu.	hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat ini masih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintah desa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendiri menjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik maupun tenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orang yang bahkan diluar dari masyarakat desa

				tersebut sehingga masyarakat menjadi tidak terlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri.
--	--	--	--	--

### 2.4 Kerangka Berpikir

Untuk lebih memudahkan <sup>39</sup> peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, maka peneliti perlu merumuskan kerangka berpikir sebagai berikut :



Sumber: diolah <sup>31</sup>Peneliti (2024)

Gambar 2.1

### Kerangka Berpikir

<sup>17</sup> Berdasarkan gambar di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menyoroti peran penting kepala desa dalam mengoordinasikan kegiatan pembangunan di desa. Kepala desa <sup>49</sup> bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan <sup>17</sup> masyarakat desa. Namun, dalam melaksanakan fungsi koordinasinya, kepala desa sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, terbatasnya anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan masalah komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala ini sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien diharapkan memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa, yang terlihat dari peningkatan kualitas <sup>29</sup> hidup masyarakat, perbaikan infrastruktur, peningkatan ekonomi lokal, serta akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Evaluasi terhadap dampak ini penting untuk menilai keberhasilan program pembangunan dan menentukan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika pembangunan desa <sup>19</sup> dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.



### **BAB III** **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **2.1.1 Pendekatan**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengungkap kompleksitas dan dinamika dari suatu fenomena atau peristiwa, memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai aspek yang saling terkait dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Studi kasus berfokus pada konteks spesifik, memberikan gambaran yang kaya tentang situasi nyata dan membantu dalam memahami bagaimana faktor-faktor lingkungan, sosial, dan budaya mempengaruhi fenomena yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna.

##### **3.1.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat *eksplanasi*, dan analisis serta jenis data. Dengan mengetahui jenis-jenis penelitian tersebut maka penelitian diharapkan dapat melihat metode yang paling efektif dan efisien untuk mendapat informasi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah.

Riset berdasarkan jenis data menurut Suliyanto (2016: 34), dibagi menjadi:

1. Riset kualitatif adalah riset yang didasarkan pada data kualitatif yaitu tidak berbentuk angka atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat.
2. Riset kuantitatif adalah riset yang didasarkan pada data kuantitatif yaitu berbentuk angka atau bilangan.

3. Riset gabungan/kombinasi adalah riset yang menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.

Dari pendapat di atas, peneliti menetapkan jenis penelitian yang digunakan yaitu riset kualitatif yaitu lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan ke subtansi makna dari fenomena tersebut dan sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat atau sering juga dikatakan berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat.

46

### 3.2 Variabel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019:68), Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimplannya.

Berdasarkan judul penelitian yang diambil maka variabel dalam penelitian ini adalah koordinasi.

25

**Tabel 3.1**

#### Variabel penelitian

No	Variabel	Penelitian
1	Menurut Soewarno Handyaningrat (Triyono dan Yuniarsih 2020)	1) Komunikasi, 2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi, 3) Partisipan, 4) Kesepakatan, 5) Komitmen, 6) Kontinuitas perencanaan.

22

### 3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian

#### 3.3.1 Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah memilih dan menetapkan lokasi penelitian sebagai objek yang menjadi sumber data dan informasi sesuai keadaan dan kondisi yang dialami. Lokasi penelitian



tersebut adalah dilaksanakan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli.

### 3.3.2 Jadwal Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini, perlu membuat acuan atau pedoman serta tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan sehingga penelitian dapat terlaksana sesuai alurnya. Maka peneliti telah membuat jadwal sebagai panduan, sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Jadwal Penelitian

Kegiatan	JADWAL																										
	Febuari 2024			April 2024			Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024								
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■	■	■																				
Konsultasi kepada Dosen Pembimbing								■	■	■	■	■	■	■	■												
Pengajuan Proposal															■												
Persiapan Seminar																			■								
Seminar Penelitian																			■								
Persiapan Penelitian																					■	■					
Pengumpulan Data																					■	■					
Penulisan Naskah Skripsi																							■	■			
Konsultasi kepada Dosen Pembimbing																							■	■	■	■	
Penyempurnaan Naskah																							■	■	■	■	
Penulisan dan Penyempurnaan Skripsi																							■	■	■	■	
Ujian Skripsi																										■	

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

### **3.4 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2019:194) Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu: 1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti. 2. Data Sekunder yaitu peneliti tidak langsung menerima dari sumber data.

Di dalam penelitian ini data primer di peroleh dari wawancara. Sedangkan data sekunder akan diambil dari dokumen, observasi, foto, data serta penelitian terdahulu yang relevan, sebagaimana penjelasan berikut ini:

- a. Data primer yakni data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri secara langsung dari objek penelitian.
- b. Data sekunder yakni data yang dikumpulkan oleh peneliti tidak secara langsung atau menggunakan sumber lain untuk memperolehnya.

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, sehingga dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Untuk memperoleh hasil yang akurat, maka peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai.

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang

diwawancarai. Oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya.

Menurut Moleong (2017: 9), mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Peneliti disebut sebagai instrument penelitian karena peneliti sendiri yang membuat rencana penelitian, melaksanakan pengumpulan data dan melakukan pengolahan data. Sebelum menyusun instrument penelitian, penting untuk diketahui pula bentuk-bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bentuk Instrumen Tes.
2. Bentuk Instrumen *Interview*.
3. Bentuk Instrumen Observasi.
4. Bentuk Instrumen Dokumentasi

Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti menggunakan instrument penelitian dengan berpedoman pada jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan bentuk instrument *observasi* dan *interview* kepada informan. Informan pada penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa dan BPD Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli sebanyak 12 orang yang terdiri dari:

Tabel 3.3  
Daftar Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	BPD	1 Orang
3	Kepala Urusan Pemerintahan	1 Orang
4	Kepala Dusun	2 Orang
5	Masyarakat	2 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>7 orang</b>

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian, keberadaan data-data dan informasi memiliki nilai yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari penelitian yang sedang dilaksanakan. Oleh karena hal tersebut, maka pengumpulan data-data yang dilakukan menggunakan pendekatan-pendekatan atau cara tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh prosedur penelitian yang berlaku. Menurut Sugiyono (2018: 224), bahwa “pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi triangulasi”. Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan observasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Data Primer, secara langsung dari responden dengan cara:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden atau kepada pihak/sumber-sumber data yang dianggap perlu.

3. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dan informasi melalui foto atau dokumentasi sebagai bukti di lapangan.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh. Menurut Sugiyono (2018), bahwa terdapat 3 tahap teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu:

1. Analisis Isi Kualitatif

Analisis ini bertujuan untuk memahami makna dari data kualitatif yang diperoleh, seperti wawancara dan dokumen. Proses ini melibatkan pengkodean data dan kategorisasi untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Proses Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dikodekan dan dikategorikan untuk menemukan tema-tema penting yang relevan dengan penelitian. Tujuan Teknik ini membantu peneliti untuk menggali makna mendalam dari data yang ada dan menjawab pertanyaan penelitian.

2. Triangulasi Data:

Triangulasi digunakan untuk memastikan validitas dan keandalan data dengan membandingkan berbagai sumber data, metode, atau teori. Proses Menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara dari berbagai informan, observasi, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh dari berbagai sumber ini kemudian dibandingkan untuk melihat konsistensi.

Tujuannya untuk Memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dengan memverifikasi data dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

3. Penyusunan Narasi atau Model Konseptual:

Penyusunan narasi atau model konseptual digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai elemen dalam penelitian secara komprehensif. Setelah data dianalisis, peneliti membuat narasi deskriptif atau model konseptual yang memvisualisasikan hubungan antar variabel yang diteliti.

Tujuannya untuk Memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur tentang dinamika dan interaksi antara variabel-variabel dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan pemahaman dan interpretasi hasil penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****4.1 Hasil Penelitian**

Deskripsi penelitian bermanfaat untuk memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, peneliti telah memperoleh data-data yang berhubungan dengan topik pembahasan pada penelitian ini, sebagaimana dijelaskan berikutnya.

**4.1.1 Sejarah Kantor Pemerintah Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli**

Desa Sifalaete adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Asal muasal diberikan nama Desa Sifalaete adalah pada zaman dahulu ada dua kelompok masyarakat yang berada pada wilayah tersebut, serta pemukiman penduduk yang berlapis-lapis. Mengingat di tempat tersebut sudah ada penduduk dan wilayah maka para leluhur memandang perlu membuat suatu aturan atau sebutan nama pada suatu wilayah/desa sehingga pada suatu saat mereka berkumpul bersama antara beberapa tokoh diantaranya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita dan tokoh pemuda merumuskan, menetapkan dan mendapatkan satu Kesimpulan menamai desa tersebut adalah Desa Sifalaete.

Setelah kesepakatan nama Desa Sifalaete muncul maka muncullah seorang pemimpin yang disebut Kepala Kampung (*Salawa Hada*) dan di percaya untuk memimpin kampung, Seiring dengan perkembangan sistim pemerintahan negara, istilah kampung dilebur menjadi desa, sehingga yang menjadi pemimpin disebut dengan istilah kepala desa.

Perlu diketahui bahwa Desa Sifalaete ini termasuk desa tertua disekitarnya yang sampai saat ini terdiri dari 3 (tiga) dusun dengan total jumlah penduduk yang tercatat sejumlah 734 jiwa yang terdiri atas 348 orang laki-laki dan 386 perempuan. Sejak berdirinya desa ini telah terjadi pergantian Kepala Desa dari waktu ke waktu hingga pada tahun 2018 kembali diadakan pemilihan kepala desa secara demokratis dan terakhir pada pemilihan kepala desa tahun 2018 masa jabatan 2019 s/d 2024 yang terpilih kepala desa adalah Ekaman Laowo, S.Pd.

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

Visi adalah tujuan atau arah utama yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau instansi, organisasi, sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan agar bisa mencapai visi tersebut. Visi dan Misi Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah sebagai berikut :

##### **1) Visi**

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan mewujudkan masyarakat Desa Sifalaete yang tentram, Maju, Makmur dan Adil.

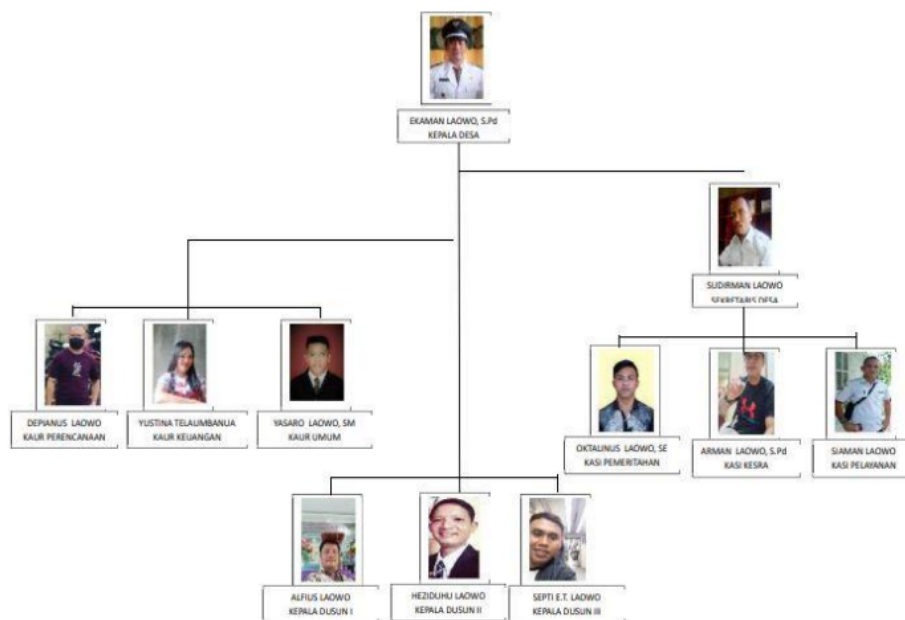
##### **2) Misi.**

1. Membangun Kerohanian di Desa Sifalaete Melalui: PA (pembelajaran Alkitab) dan Koor /Vokal Group;
2. Melaksanakan Percepatan /Melanjutkan program-program Pemerintah yang ada ataupun yang masuk di Desa Sifalaete;
3. Melaksanakan percepatan pembangunan di Desa Sifalaete yang Transfran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
4. Memfasilitasi Pengadaan Penerangan lampu jalan di Desa Sifalaete Melalui Instansi terkait (dalam hal ini PLN);
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMDES UKM Serta Meningkatkan Kapasitas Petani di Desa Sifalaete;

6. Mewujudkan Pemuda yang kreatif , Inovatif, Maju dan Berkualitas;
7. Memfasilitasi/mendukung Program-program lansia sendoro, Pemuda/I, dan seluruh organisasi yang ada di Desa Sifalaete sebagai wahana untuk menyalurkan bakat /hobi, menyalurkan ide/gagasan dan berkreasi;
8. Memanfaatkan sumberdaya alam dalam membangun Desa yang berkelanjutan;
9. Melayani seluruh masyarakat Desa Sifalaete dengan tulus dan penuh tanggung jawab.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

**Gambar 4.1.3**  
**Pemerintah Desa Sifalaete**



*Sumber: SOTK Pemerintah Desa Sifalaete (2024).*



#### 4.1.4 Karakteristik Informan

Pada uraian ini peneliti mengemukakan data penelitian yang merupakan data hasil yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu: di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, khususnya menjelaskan dan menganalisis Peran Komunikasi Aparatur Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti sendiri kepada Kepala Desa Sifalaete. Sebagai narasumber dalam mengadakan observasi secara langsung pada lokasi penelitian guna memperoleh data secara langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti akan menguraikan pembahasan secara teoritis maupun secara langsung pada objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi identitas narasumber adalah: nama, pendidikan terakhir, dan jabatan. Dalam penelitian ini narasumber berjumlah 7 orang yaitu: Kepala Desa dan Aparat Desa Sifalaete. Yang disajikan peneliti pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Nama – Nama Informan Kunci**

No	Nama	Jabatan
1	Ekaman Laowo,S.Pd	Kepala Desa

Sumber: Olahan Penulis, 2024

**Tabel 4.2**  
**Nama – Nama Informan Pendukung**

No	Nama	Jabatan
1	Nafao Laowo	Ketua BPD
2	Alfinus Laowo	Kepala Dusun 1
3	Heseziduhu Laowo	Kepala Dusun 2
4	Oktalinus Laowo, S.E	Kepala Urusan Pemerintahan
5	Falo'o Laowo	Tokoh Masyarakat
6	Lentriman laowo	Tokoh Masyaarkat

Sember: Olahan Penulis, 2024

#### **4.2 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian merupakan suatu karya tulis ilmiah yang mengandung informasi atau keterangan yang didapat selama melaksanakan kegiatan penelitian dilapangan. Informasi atau keterangan tersebut didapat melalui wawancara mendalam secara langsung kepada informan, observasi dan dokumentasi sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan . objek penelitian yang digunakan yaitu di Kantor Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi koordinasi kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, terutama dalam perencanaan pembangunan desa Untuk menganalisis kendala yang dihadapi kepala desa dalam melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan pembangunan di desa sifalaete kecamatan gunungsitoli idanoi.

Berdasarkan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan penelitian, maka peneliti melaksanakan tahapan-tahapan tersebut dengan menggunakan draf wawancara sehingga didapatkan data dari informan yaitu terdiri dari 1 orang Kepala Desa Sifalaete, 1 orang Ketua BPD Desa Sifalaete, 2 orang Kepala Dusun Desa Sifalaete dan 2 orang Tokoh Masyarakat Desa Sifalaete sebagai berikut:

##### **4.2.1 Komunikasi**

Komunikasi merupakan elemen kunci dalam fungsi koordinasi Kepala Desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Dalam konteks ini, komunikasi efektif memungkinkan Kepala Desa untuk menyampaikan visi dan kebijakan pembangunan kepada masyarakat serta mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Menurut Hargie (2019), komunikasi efektif dalam organisasi melibatkan aliran informasi yang jelas dan transparan antara semua pihak

yang terlibat, yang penting untuk keberhasilan koordinasi dan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ekaman Laowo,S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Kunci. Dengan Pertanyaan: Bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas komunikasi antara kepala desa dan masyarakat dalam proses pembangunan? **Pada hari** senin, Tanggal 12 Agustus 2024 **beliau mengatakan bahwa:**

*“Saya menilai komunikasi antara saya sebagai kepala desa dan masyarakat cukup efektif dalam proses pembangunan. Saya selalu berusaha menyampaikan rencana dan program dengan jelas, serta terbuka terhadap masukan dari warga. Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat, saya percaya dialog yang terbuka dapat mengatasi itu.”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“Komunikasi antara kepala desa dan masyarakat cukup berjalan, namun masih bisa ditingkatkan. Kepala desa sudah berusaha menyampaikan informasi, tapi mungkin masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami rencana pembangunan. Kami di BPD berusaha menjadi jembatan agar komunikasi ini lebih lancar.”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Alfius Laowo (Kepala Dusun 1 Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“Menurut saya, komunikasi antara kepala desa dan masyarakat masih perlu diperbaiki. Meski kepala desa sudah memberikan informasi, terkadang penjelasannya kurang bisa dipahami oleh sebagian warga. Kami berharap komunikasi yang lebih jelas dan interaktif bisa membuat masyarakat lebih memahami dan mendukung pembangunan.”*

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif antara kepala desa dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan.

Selanjutnya hasil wawancara pertanyaan Alat atau metode apa saja yang digunakan untuk memastikan komunikasi berjalan lancar dan efektif? Pertanyaan ini tertuju kepada Bapak Ekaman Laowo,S.Pd (Kepala Desa

Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan kunci.

Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“saya memastikan komunikasi berjalan lancar dan efektif dengan mengadakan rapat rutin antara perangkat desa dan masyarakat. Saya juga menggunakan teknologi seperti grup WhatsApp untuk menyebarkan informasi dengan cepat. Selain itu, saya sering turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, sehingga semua pihak merasa didengar dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Alfius Laowo (Kepala Dusun 1 Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“kami lebih memilih untuk menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih struktural. Kami sering mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat. Kami juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sudah melalui proses musyawarah dan mufakat, sehingga semua pihak merasa didengarkan dan dihargai. Dengan cara ini, kami berusaha untuk menjaga agar komunikasi tetap berjalan lancar dan semua pihak merasa dilibatkan.”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Folo’o Laowo (Tokoh Masyarakat Desa Sifalaete) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“saya merasa penting untuk tetap terlibat dalam setiap forum yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Meski kadang kami merasa tidak setuju dengan beberapa kebijakan, namun dengan mengikuti rapat desa dan menyampaikan pendapat secara langsung, saya merasa suara kami masih bisa didengar. Komunikasi yang efektif bagi kami adalah ketika pemerintah desa bersedia mendengarkan keluhan dan masukan kami, serta memberikan penjelasan yang mudah dipahami.”*

Berdasarkan hasil wawancarakepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa untuk memastikan komunikasi berjalan lancar dan efektif, penggunaan alat komunikasi modern, rapat koordinasi yang terdokumentasi dengan baik, dan forum diskusi terbuka adalah metode yang dianjurkan. Kepala desa mengutamakan teknologi dan pertemuan rutin, BPD fokus pada dokumentasi dan informasi papan, sementara masyarakat menekankan pentingnya transparansi dan dialog. Menggabungkan pendekatan ini dapat membantu menjembatani perbedaan pandangan dan meningkatkan efektivitas komunikasi di tingkat desa.

Selanjutnya hasil wawancara pertanyaan Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam komunikasi? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Pertanyaan ini tertuju kepada Bapak Ekaman Laowo, S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan kunci. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Tantangan komunikasi di Desa Sifalaete lebih banyak muncul karena adanya ketidaksepahaman antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun. BPD seringkali memiliki pandangan yang berbeda terkait prioritas pembangunan desa, sehingga terjadi hambatan dalam penyampaian informasi dan pelaksanaan program-program pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, Kepala Desa dan Kepala Dusun berupaya mempererat hubungan komunikasi melalui pertemuan rutin dan diskusi terbuka, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Heziduhu laowo (Kepala Dusun 2 Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Di Desa Sifalaete, tantangan komunikasi yang dihadapi bersifat kompleks, melibatkan perbedaan pandangan antara BPD dan aparatur desa lainnya, termasuk Kepala Desa dan Kepala Dusun. BPD merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sedangkan Kepala Desa dan Kepala Dusun merasa bahwa BPD sering kali lambat dalam memberikan persetujuan untuk program-program pembangunan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan frekuensi komunikasi dan memperkuat koordinasi antar pihak melalui forum-forum musyawarah desa yang lebih inklusif.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Tantangan komunikasi di Desa Sifalaete sering kali muncul dari kurangnya transparansi dan keterbukaan dari Kepala Desa dan Kepala Dusun dalam menyampaikan informasi penting kepada BPD. Hal ini menyebabkan BPD kesulitan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pemberi saran. Untuk mengatasi masalah ini, BPD menuntut agar Kepala Desa dan Kepala Dusun lebih transparan dan bersedia melibatkan BPD sejak tahap perencanaan, sehingga dapat tercipta komunikasi yang lebih efektif dan sinergi yang lebih baik dalam pembangunan desa.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa Tantangan komunikasi di Desa Sifalaete berakar pada perbedaan pandangan dan kurangnya koordinasi antara BPD dan aparatur desa lainnya. Penyelesaian masalah ini memerlukan upaya peningkatan transparansi, keterbukaan, serta frekuensi komunikasi dan

koordinasi antar pihak yang terlibat, sehingga setiap pihak merasa dilibatkan dan dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan desa.

#### **4.2.2 Kesadaran Pentingnya Komunikasi**

Kesadaran akan pentingnya komunikasi menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi koordinasi, terutama dalam konteks koordinasi Kepala Desa guna meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Komunikasi yang efektif antara Kepala Desa dan berbagai pihak terkait, seperti perangkat desa, masyarakat, serta lembaga-lembaga lokal, menjadi kunci suksesnya implementasi program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Robbins dan Coulter (2020), komunikasi adalah proses dimana informasi dipertukarkan antara individu atau kelompok untuk mencapai pemahaman yang sama. Dalam konteks ini, pemahaman bersama sangat diperlukan agar setiap kebijakan dan rencana pembangunan dapat diimplementasikan dengan baik dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ekaman Laowo,S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Kunci. Dengan Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa kesadaran tentang pentingnya koordinasi sudah merata di kalangan masyarakat dan aparatur desa? **Pada hari** senin, Tanggal 12 Agustus 2024 **beliau mengatakan bahwa:**

*"Saya merasa kesadaran tentang pentingnya koordinasi sudah cukup merata, terutama di kalangan aparatur desa. Mereka memahami betapa pentingnya bekerja sama demi kemajuan desa. Masyarakat juga secara umum mendukung, meskipun ada beberapa yang belum sepenuhnya memahami, namun kami terus memberikan sosialisasi agar semua pihak bisa sejalan."*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*"Kesadaran tentang pentingnya koordinasi sudah ada, tapi belum sepenuhnya merata. Di tingkat aparatur desa, kesadaran itu lebih jelas terlihat, namun di masyarakat, masih ada yang belum terlalu peduli. Kami, di BPD, berusaha untuk menyeimbangkan pendapat agar semua pihak bisa bekerja sama dengan baik."*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Lentrinan Laowo (Tokoh Masyarakat Desa Sifalaete) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*"Menurut kami, kesadaran tentang pentingnya koordinasi masih perlu ditingkatkan. Memang ada kemajuan di aparatur desa, tetapi di kalangan masyarakat, masih ada kebingungan tentang apa manfaat nyata dari koordinasi ini. Harus ada upaya lebih untuk menyamakan pemahaman di semua pihak."*

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa kesadaran tentang pentingnya koordinasi sudah mulai tumbuh, terutama di kalangan aparatur desa. Namun, di kalangan masyarakat, kesadaran ini masih bervariasi dan perlu ditingkatkan lebih lanjut melalui sosialisasi dan upaya bersama.

Selanjutnya hasil wawancara pertanyaan Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pentingnya koordinasi dalam proses pembangunan di Desa Sifalaete? Pertanyaan ini tertuju kepada Bapak Ekaman Laowo,S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan kunci. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*"Koordinasi adalah kunci utama dalam proses pembangunan di Desa Sifalaete. Sebagai kepala desa, saya melihat bahwa tanpa koordinasi yang baik antara semua pihak, pembangunan akan sulit berjalan dengan efektif. Melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa, BPD, hingga masyarakat umum, memungkinkan kita untuk memahami kebutuhan dan aspirasi warga. Dengan koordinasi yang solid, setiap tahapan pembangunan dapat direncanakan dan dieksekusi dengan baik, sehingga hasilnya benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga desa."*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*"Koordinasi memang sering disebut sebagai elemen penting dalam pembangunan, tetapi dalam praktiknya di Desa Sifalaete, koordinasi yang diharapkan belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara kepala desa dan BPD. Banyak keputusan yang diambil tanpa konsultasi yang memadai, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaksepahaman dalam pelaksanaan program pembangunan. Jika koordinasi tidak diperbaiki, maka hasil pembangunan yang optimal sulit untuk dicapai."*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Lentrinan Laowo (Tokoh Masyarakat Desa Sifalaete) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“saya merasa bahwa koordinasi dalam pembangunan memang penting, namun perlu ada perbaikan. Terkadang, koordinasi yang dilakukan terasa kurang melibatkan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ada beberapa keputusan yang mungkin kurang sesuai dengan harapan kami. Harapannya, koordinasi ke depan bisa lebih inklusif, sehingga semua suara dapat didengar dan dipertimbangkan.”*

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa semua pihak mengakui pentingnya koordinasi dalam pembangunan di Desa Sifalaete, meskipun terdapat pandangan yang berbeda mengenai pelaksanaannya, sehingga peningkatan kualitas koordinasi masih diperlukan untuk mencapai hasil yang efektif dan inklusif.

Selanjutnya hasil wawancara pertanyaan Langkah-langkah apa yang telah diambil untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya koordinasi ini? Pertanyaan ini tertuju kepada Bapak Ekaman Laowo,S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan kunci. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“saya menyatakan bahwa berbagai langkah telah diambil untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya koordinasi dalam pembangunan desa. Salah satu langkah utama adalah menyelenggarakan pertemuan rutin antara pemerintah desa dan masyarakat, di mana peran serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam pembangunan dibahas secara rinci. Selain itu, pemerintah desa juga telah melibatkan tokoh masyarakat dan kepala dusun dalam sosialisasi dan diskusi tentang pentingnya koordinasi, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung setiap inisiatif pembangunan yang dilakukan. Dengan pendekatan ini, saya yakin bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya koordinasi telah meningkat secara signifikan, dan ini akan berdampak positif pada kelancaran dan efektivitas pembangunan di desa.”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“mengemukakan kritik terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa terkait peningkatan kesadaran tentang pentingnya koordinasi. BPD*



*menilai bahwa langkah-langkah yang diambil masih sangat terbatas dan tidak menyentuh akar permasalahan di masyarakat. Mereka menyoroti kurangnya transparansi dan partisipasi dari pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut BPD, pertemuan yang diadakan hanya bersifat formalitas dan tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk benar-benar memahami dan berkontribusi dalam koordinasi pembangunan. BPD merekomendasikan agar pemerintah desa memperbaiki pendekatan mereka dengan mengadakan dialog yang lebih terbuka dan mendalam, serta melibatkan semua pihak secara lebih aktif dan berkesinambungan.*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Lentrinan Laowo (Tokoh Masyarakat Desa Sifalaete) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“saya memberikan pandangan yang seimbang mengenai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya koordinasi. Di satu sisi, saya mengakui bahwa pemerintah desa telah mengadakan beberapa pertemuan dan diskusi untuk membahas pentingnya koordinasi antara berbagai pihak. Namun, ia juga menyoroti bahwa upaya ini belum sepenuhnya efektif karena masih ada kelompok masyarakat yang merasa kurang dilibatkan atau kurang memahami urgensi dari koordinasi ini. Menurutnya, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, untuk memastikan bahwa semua pihak dapat berperan aktif dalam koordinasi pembangunan desa.”*

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa Tanggapan dari berbagai pihak menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya koordinasi di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Kepala Desa optimis dengan langkah-langkah yang telah diambil, sementara Kepala Dusun mengakui adanya upaya tersebut namun menyoroti perlunya peningkatan dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, BPD memberikan kritik keras terhadap kurangnya transparansi dan partisipasi dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih diperlukan upaya yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua pihak benar-benar memahami dan mendukung pentingnya koordinasi dalam pembangunan desa.

### **4.2.3 Partisipasi**

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam proses pembangunan desa, di mana keterlibatan aktif warga memungkinkan terciptanya keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, partisipasi bukan hanya sekadar hadir dalam musyawarah, tetapi juga mencakup kontribusi ide, tenaga, dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendukung berbagai program pembangunan. Kepala desa memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan partisipasi ini, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat terlibat dan bahwa aspirasi mereka diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ekaman Laowo, S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Kunci. Dengan Pertanyaan: Siapa saja yang biasanya terlibat dalam proses koordinasi pembangunan di desa ini? **Pada hari** senin, Tanggal 12 Agustus 2024 **beliau mengatakan bahwa:**

*“Dalam proses koordinasi pembangunan di Desa Sifalaete, Kepala Desa memainkan peran sentral yang sangat krusial. Sebagai pemimpin desa, Kepala Desa memiliki wewenang dan tanggung jawab utama dalam merencanakan dan mengarahkan pembangunan di desa. Beliau berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan kepala dusun, untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi warga desa dapat diakomodasi. Kepala Desa juga sering kali bertindak sebagai mediator antara pemerintah daerah dan masyarakat, memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat.”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“Koordinasi pembangunan di Desa Sifalaete seringkali mengalami tantangan, terutama terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan seringkali dianggap kurang berfungsi secara optimal. Ada kekhawatiran bahwa BPD tidak selalu terlibat secara efektif dalam proses perencanaan dan implementasi proyek pembangunan, yang dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Sebagai hasilnya, proyek pembangunan di desa bisa saja tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dan keputusan yang diambil mungkin tidak selalu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Heziduhu laowo (Kepala Dusun 2 Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam proses koordinasi pembangunan di Desa Sifalaete, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah dua pihak utama yang terlibat. Kepala Desa berperan aktif dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan, sering kali bekerja sama dengan BPD untuk memastikan bahwa proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, ada kalanya terdapat ketegangan antara Kepala Desa dan BPD terkait pengambilan keputusan. Kepala Desa mungkin merasa bahwa keputusan yang diambil BPD tidak selalu mencerminkan aspirasi seluruh warga, sementara BPD mungkin merasa bahwa Kepala Desa tidak selalu melibatkan mereka dalam proses perencanaan yang transparan. Kendala ini bisa memengaruhi efektivitas koordinasi pembangunan di desa.”*

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa proses koordinasi pembangunan di Desa Sifalaete melibatkan Kepala Desa dan BPD sebagai pihak utama. Kepala Desa berperan sebagai pengarah utama dan mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah, sementara BPD diharapkan untuk berfungsi sebagai mitra pengawas dan perencana. Meskipun peran Kepala Desa umumnya diakui secara positif, terdapat beberapa tantangan dalam koordinasi dengan BPD, yang bisa mempengaruhi efektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan Bagaimana Bapak/Ibu melibatkan berbagai partisipan seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan pihak lain dalam koordinasi pembangunan? Pertanyaan ini tertuju kepada Bapak Ekaman Laowo,S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan kunci. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“saya sangat mengutamakan keterlibatan berbagai partisipan dalam setiap proses pembangunan di Desa Sifalaete. Kami secara rutin mengadakan rapat desa yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan melibatkan mereka, kami dapat memastikan bahwa setiap suara didengar dan kepentingan seluruh pihak diperhatikan. Ini bukan hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa rencana pembangunan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi*

*masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai kelompok ini sangat berkontribusi dalam pencapaian pembangunan yang efektif dan berkelanjutan."*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*"kami merasa bahwa keterlibatan dalam koordinasi pembangunan di Desa Sifalaete belum mencapai tingkat yang diharapkan. Meskipun Kepala Desa sering mengundang tokoh masyarakat dan pemuda, partisipasi ini seringkali tidak efektif dan kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap keputusan pembangunan. BPD merasa bahwa proses koordinasi sering kali berjalan secara sepihak, dan masukan dari anggota BPD serta masyarakat belum sepenuhnya dipertimbangkan. Kami percaya bahwa jika keterlibatan berbagai pihak lebih diprioritaskan dan didorong secara konsisten, hasil pembangunan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat."*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Heziduhu laowo (Kepala Dusun 2 Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Folo'o Laowo (Tokoh Masyarakat Desa Sifalaete) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*"Saya sebagai bagian dari masyarakat merasa bahwa koordinasi pembangunan yang dilakukan kepala desa kadang kurang melibatkan kami secara langsung. Meskipun ada undangan untuk rapat, saya merasa masukan dari masyarakat sering kali tidak dijadikan prioritas. Kami berharap ada peningkatan dalam cara kepala desa mengakomodasi berbagai pendapat sehingga semua pihak merasa dilibatkan."*

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa upaya melibatkan berbagai partisipan dalam koordinasi pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah, forum rutin, dan komunikasi terbuka. Pendekatan ini bertujuan untuk mengakomodasi berbagai pandangan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan Apakah ada kendala dalam melibatkan partisipan tersebut? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Pertanyaan ini tertuju kepada Bapak Ekaman Laowo,S.Pd

(Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan kunci. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*"Melibatkan partisipan dalam program pembangunan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi umumnya berjalan dengan baik. Kepala Desa memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dengan cara menyelenggarakan sosialisasi yang intensif dan melibatkan warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini membantu menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi. Sebagai contoh, kegiatan rapat desa yang rutin dan forum diskusi terbuka telah terbukti efektif dalam mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam program-program desa."*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*"Meskipun Kepala Desa dan Kepala Dusun telah berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam program pembangunan di Desa Sifalaete, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Beberapa warga merasa bahwa mekanisme partisipasi yang ada belum sepenuhnya efektif, terutama dalam hal penyampaian informasi yang kurang merata. Hal ini dapat mengakibatkan keterlibatan yang tidak optimal dari masyarakat. Untuk mengatasi kendala ini, disarankan agar ada evaluasi lebih lanjut mengenai metode komunikasi yang digunakan dan mungkin mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat."*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Lentrinan Laowo (Tokoh Masyarakat Desa Sifalaete) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*"Partisipasi masyarakat di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi memang menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama berkat inisiatif Kepala Desa yang proaktif dalam melibatkan warga melalui berbagai kegiatan sosial dan pertemuan. Namun, ada beberapa kendala yang masih perlu diatasi, seperti keterbatasan waktu dan kesibukan warga yang menghambat kehadiran mereka dalam rapat desa. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya fleksibilitas dalam jadwal pertemuan dan penggunaan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan komunikasi. Dengan upaya kolaboratif antara Kepala Desa, BPD, dan Kepala Dusun, diharapkan kendala ini dapat diminimalisir."*

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa Dalam melibatkan partisipan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, ada pandangan positif mengenai upaya Kepala Desa dan Kepala Dusun yang berhasil mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan forum terbuka. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan waktu dan kesibukan warga yang perlu diatasi dengan

fleksibilitas jadwal dan pemanfaatan teknologi informasi. Kendala tersebut menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme komunikasi dan partisipasi untuk memastikan keterlibatan masyarakat yang lebih efektif dan inklusif.

#### 4.2.4 Kesepakatan

Kesepakatan dalam konteks koordinasi kepala desa merupakan elemen penting dalam meningkatkan pembangunan desa, khususnya di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Kesepakatan merujuk pada proses dimana kepala desa, perangkat desa, serta anggota masyarakat mencapai pemahaman bersama tentang tujuan, rencana, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memajukan desa. Hal ini melibatkan dialog, negosiasi, dan konsensus di antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ekaman Laowo,S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Kunci. Dengan Pertanyaan: Bagaimana proses mencapai kesepakatan dalam setiap rencana pembangunan di desa? **Pada hari** senin, Tanggal 12 Agustus 2024 **beliau mengatakan bahwa:**

*“Proses mencapai kesepakatan dalam setiap rencana pembangunan di Desa Sifalaete dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk warga desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Kepala desa sebagai koordinator utama memastikan bahwa setiap rencana pembangunan dibahas secara terbuka dalam forum musyawarah desa, sehingga semua pendapat dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi. Langkah ini memfasilitasi pengambilan keputusan yang inklusif dan mengurangi potensi konflik. Kepala desa juga melakukan sosialisasi secara rutin untuk memastikan bahwa informasi mengenai rencana pembangunan sampai kepada seluruh warga. Jika terdapat perbedaan pendapat, proses musyawarah dilakukan secara berulang hingga mencapai kesepakatan bersama, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“Proses mencapai kesepakatan dalam rencana pembangunan di Desa Sifalaete terkadang menghadapi kendala yang signifikan. Beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merasa bahwa musyawarah tidak selalu mencerminkan aspirasi seluruh warga karena ada kemungkinan adanya dominasi dari kelompok tertentu atau ketidakmerataan dalam pengumpulan aspirasi. Masalah ini seringkali menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan dapat menghambat implementasi pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya perbaikan dalam mekanisme musyawarah agar lebih inklusif dan adil, serta adanya pemantauan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Lentrinan Laowo (Tokoh Masyarakat Desa Sifalaete) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“proses kesepakatan seringkali terhambat oleh kurangnya transparansi dan komunikasi. Mereka merasa bahwa keputusan sering diambil tanpa melibatkan mereka secara langsung, dan suara mereka tidak selalu diperhitungkan secara adil. Untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik, mereka mengusulkan perlunya lebih banyak dialog terbuka dan transparansi dalam setiap tahap perencanaan.”*

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa Proses mencapai kesepakatan dalam rencana pembangunan di desa memerlukan komunikasi yang efektif antara kepala desa, BPD, dan masyarakat. Kepala desa mengutamakan dialog terbuka, BPD menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan keadilan, sementara masyarakat menginginkan transparansi dan keterlibatan lebih dalam proses perencanaan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan Apakah ada mekanisme khusus yang digunakan untuk memastikan semua pihak yang terlibat merasa puas dengan kesepakatan yang dicapai? Pertanyaan ini tertuju kepada Bapak Ekaman Laowo,S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan kunci. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“Di Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, mekanisme khusus yang diterapkan untuk memastikan kepuasan semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan adalah sangat baik. Kepala desa secara aktif melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum musyawarah yang terbuka. Forum ini memungkinkan setiap warga untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka, sehingga kesepakatan yang dicapai mencerminkan kebutuhan dan harapan seluruh pihak. Dengan*

*adanya transparansi dan komunikasi yang intensif, masyarakat merasa dihargai dan puas dengan hasil kesepakatan.”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“Mekanisme yang ada di Desa Sifalaete dalam memastikan kepuasan pihak yang terlibat dalam kesepakatan mungkin perlu beberapa perbaikan. Meskipun ada usaha dari kepala desa untuk melibatkan masyarakat melalui pertemuan rutin, beberapa kepala dusun merasa bahwa proses ini belum sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak. Masih terdapat beberapa kendala dalam hal koordinasi dan komunikasi yang dapat mempengaruhi kepuasan pihak-pihak yang terlibat. Ada harapan bahwa dengan memperbaiki mekanisme dan melibatkan lebih banyak pihak secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, kepuasan semua pihak dapat lebih terjamin.”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Heziduhu laowo (Kepala Dusun 2 Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“Mekanisme yang digunakan di Desa Sifalaete untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak memang telah mengalami banyak perbaikan. Kepala desa sering mengadakan pertemuan untuk mendengarkan masukan dari masyarakat dan berusaha mengakomodasi berbagai pendapat. Namun, beberapa pihak, seperti anggota BPD, merasa bahwa proses ini terkadang belum sepenuhnya mencakup semua pandangan. Meskipun upaya komunikasi yang dilakukan cukup baik, masih ada tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan semua pihak, terutama dalam hal waktu dan efektivitas pelaksanaan keputusan. Keterlibatan lebih intensif dari BPD dapat membantu memperbaiki proses ini dan meningkatkan kepuasan semua pihak.”*

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa mekanisme yang diterapkan di Desa Sifalaete untuk memastikan kepuasan pihak yang terlibat dalam kesepakatan menunjukkan beberapa kekuatan, terutama dalam hal keterlibatan kepala desa dan forum musyawarah. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal inklusivitas dan koordinasi dengan BPD serta kepala dusun. Upaya untuk memperbaiki mekanisme ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kepuasan semua pihak dan memastikan proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan adil.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan Bagaimana Bapak/Ibu menangani jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik dalam



proses mencapai kesepakatan? Pertanyaan ini tertuju kepada Bapak Ekaman Laowo, S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan kunci. Dimana beliau mengatakan bahwa:

"Sebagai Kepala Desa, saya percaya bahwa penanganan perbedaan pendapat atau konflik harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis konsensus. Kami mengadakan pertemuan rutin dengan warga untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran mereka. Dengan melibatkan semua pihak dalam diskusi terbuka, kami dapat memastikan bahwa setiap suara didengar dan solusi yang dihasilkan merupakan kesepakatan bersama. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat hubungan antarwarga, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap keputusan yang diambil."

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Heziduhu laowo (Kepala Dusun 2 Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

"Sebagai Kepala Dusun, saya menyadari pentingnya menangani perbedaan pendapat dengan pendekatan yang bijaksana. Kami berusaha untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif dan mengakomodasi pandangan yang berbeda. Namun, terkadang proses ini bisa memakan waktu dan menghadapi tantangan, terutama jika ada pihak-pihak yang tidak sepenuhnya terbuka untuk kompromi. Walaupun kami berupaya untuk menjaga agar setiap diskusi tetap produktif, terdapat situasi di mana konsensus sulit dicapai, dan ini memerlukan evaluasi mendalam serta kesabaran dalam mencari solusi yang adil bagi semua pihak."

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

"Menangani perbedaan pendapat atau konflik dalam proses mencapai kesepakatan di desa sering kali menjadi tantangan, terutama jika pendekatan yang diambil tidak melibatkan mekanisme penyelesaian yang jelas. Dalam beberapa kasus, terdapat kekhawatiran bahwa proses mediasi tidak selalu efektif dan bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga jika hasilnya dianggap tidak adil atau tidak memadai. Diperlukan adanya sistem yang lebih transparan dan prosedur yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa semua pihak merasa terwakili dan keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak."

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa Penanganan perbedaan pendapat atau konflik dalam proses mencapai kesepakatan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi memerlukan pendekatan yang inklusif dan konstruktif. Kepala Desa cenderung mengedepankan dialog terbuka untuk

mencapai konsensus, sedangkan Kepala Dusun mengakui tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses tersebut. Di sisi lain, BPD menunjukkan kekhawatiran tentang efektivitas metode mediasi yang ada dan perlunya sistem yang lebih terstruktur. Pendekatan yang seimbang dan prosedur yang transparan dapat membantu mencapai keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak.

#### 4.2.5 Komitmen

Komitmen adalah elemen penting dalam konteks fungsi koordinasi kepala desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Komitmen kepala desa terhadap tugas dan tanggung jawabnya berperan besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa. Menurut Avolio dan Gardner (2020), komitmen adalah dedikasi yang mendalam terhadap visi dan tujuan organisasi, yang mendorong individu untuk melakukan usaha ekstra dan berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks desa, komitmen kepala desa mencerminkan dedikasi terhadap pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan pemecahan masalah komunitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ekaman Laowo, S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Kunci. Dengan Pertanyaan: Seberapa penting komitmen dari semua pihak dalam proses koordinasi pembangunan? **Pada hari** senin, Tanggal 12 Agustus 2024 **beliau mengatakan bahwa:**

“Komitmen dari semua pihak dalam proses koordinasi pembangunan di Desa Sifalaete sangatlah penting. Kepala desa memiliki peran sentral sebagai pemimpin yang harus mengarahkan dan memotivasi setiap pihak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Dengan komitmen penuh dari kepala desa, seluruh elemen masyarakat, termasuk perangkat desa dan warga, akan lebih mudah untuk bersinergi dalam mencapai tujuan pembangunan. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya tergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada seberapa kuat komitmen yang dimiliki oleh kepala desa dalam mengoordinasikan segala upaya bersama.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Heziduhu laowo (Kepala Dusun 2 Desa Sifalaete Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Komitmen dari semua pihak memang penting dalam proses koordinasi pembangunan di Desa Sifalaete, namun ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Kepala dusun, sebagai perpanjangan tangan dari kepala desa, memiliki peran krusial dalam memastikan setiap warga di dusunnya terlibat dan mendukung program-program pembangunan. Namun, tantangan muncul ketika komitmen dari pihak-pihak lain, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok masyarakat, tidak selalu sejalan atau sekuat yang diharapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana kepala dusun bisa berperan sebagai mediator untuk menyalurkan berbagai kepentingan dan komitmen yang ada.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Komitmen dari semua pihak dalam proses koordinasi pembangunan di Desa Sifalaete memang sangat dibutuhkan, tetapi dalam praktiknya, sering kali tantangan muncul ketika tidak semua pihak memiliki komitmen yang sama kuat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam proses ini, kadang-kadang menghadapi kendala dalam menyalurkan visi dan misi dengan pihak lain, terutama jika terdapat perbedaan pandangan atau prioritas. Meskipun begitu, penting untuk tetap menjaga komunikasi yang baik agar komitmen yang ada bisa terus diperkuat, dan proses pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan di atas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa komitmen dari semua pihak sangat penting dalam memastikan proses koordinasi pembangunan di Desa Sifalaete berjalan dengan baik. Kepala desa memiliki peran sentral dalam menggerakkan komitmen tersebut, tetapi tantangan dalam penyaluran visi dan prioritas dari berbagai pihak, termasuk BPD dan kepala dusun, perlu diatasi dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Dengan menjaga komunikasi yang baik dan menguatkan komitmen bersama, pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan Bagaimana cara Bapak/Ibu memastikan bahwa komitmen tersebut dijaga dan dilaksanakan dengan baik? Pertanyaan ini tertuju kepada Bapak Ekaman Laowo,S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan kunci. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Komitmen untuk menjaga dan melaksanakan program pembangunan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi selalu dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh Kepala Desa. Setiap program atau keputusan yang diambil telah melalui musyawarah desa, di mana partisipasi warga sangat diperhatikan. Kepala Desa selalu mengedepankan transparansi dan keterbukaan dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam mengawasi pelaksanaan setiap program agar sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Dengan adanya pemantauan yang rutin dan evaluasi berkala, Kepala Desa memastikan bahwa komitmen yang sudah dibangun tidak hanya sekadar wacana tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Alfius Laowo (Kepala Dusun 1 Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Kepala Dusun berperan penting dalam menjaga komitmen pelaksanaan program pembangunan di Desa Sifalaete. Di satu sisi, Kepala Dusun secara aktif berkoordinasi dengan warga dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, tantangan dalam komunikasi dan keterbatasan sumber daya kadang-kadang menjadi hambatan dalam menjalankan komitmen tersebut dengan optimal. Meski begitu, Kepala Dusun terus berupaya untuk memperbaiki diri dengan mencari solusi atas masalah yang dihadapi, sehingga komitmen yang telah dibuat dapat tetap berjalan dengan baik.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam memastikan komitmen pembangunan desa dilaksanakan. Namun, dalam beberapa kasus, ada kekhawatiran bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Meski BPD berusaha menjalankan tugasnya dengan baik, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan komitmen di lapangan, seperti koordinasi yang kurang optimal dan keterbatasan dalam pengawasan langsung. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan agar BPD dapat berfungsi lebih maksimal dalam menjaga komitmen tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa Kepala Desa memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga komitmen pembangunan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Dengan pendekatan yang transparan dan partisipatif, Kepala Desa memastikan bahwa setiap komitmen yang telah disepakati dengan warga dilaksanakan dengan baik, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan Adakah contoh konkret di mana komitmen yang kuat telah berhasil membawa perubahan positif dalam pembangunan desa? Pertanyaan ini tertuju kepada Bapak Ekaman Laowo, S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan kunci. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Saya sebagai Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, sangat bangga dengan komitmen yang kuat yang telah kami tunjukkan dalam pembangunan desa. Sebagai contoh konkret, program pembangunan jalan desa yang selama ini menjadi prioritas kami berhasil direalisasikan berkat sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Komitmen ini tidak hanya mempercepat akses antarwilayah tetapi juga meningkatkan perekonomian desa karena akses transportasi yang lebih mudah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat, perubahan positif dapat tercapai.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Komitmen yang kuat memang telah terlihat dalam beberapa inisiatif pembangunan di Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, seperti dalam upaya pembangunan jalan desa. Namun, jika dilihat lebih dalam, ada beberapa kendala yang menghambat realisasi komitmen tersebut secara optimal, terutama dalam hal partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya terlibat. BPD perlu lebih proaktif dalam menyelaraskan visi dengan Kepala Desa agar komitmen yang kuat dapat menghasilkan dampak yang lebih signifikan dan menyeluruh.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Heziduhu laowo (Kepala Dusun 2 Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, kami telah melihat bahwa komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk Kepala Desa, BPD, dan Kepala Dusun, telah berhasil membawa perubahan positif dalam pembangunan desa. Misalnya, pembangunan balai desa baru yang menjadi tempat berbagai kegiatan masyarakat. Namun, meskipun ada banyak keberhasilan, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti komunikasi dan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa, agar komitmen yang kuat ini dapat diterapkan secara lebih merata dan efektif.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan di atas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa komitmen yang kuat memang menjadi kunci dalam membawa perubahan positif dalam pembangunan desa. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan sinergi yang lebih baik antara semua pihak, termasuk Kepala Desa, BPD, dan masyarakat.

Koordinasi yang lebih intens dan partisipasi yang lebih luas akan membantu memperkuat dampak positif dari komitmen tersebut.

#### **4.2.6 Kontinuitas Perencanaan**

Kontinuitas perencanaan adalah aspek krusial dalam memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya bersifat ad-hoc tetapi berkelanjutan. Dalam konteks fungsi koordinasi Kepala Desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, kontinuitas perencanaan memainkan peran sentral. Kontinuitas ini memastikan bahwa perencanaan yang dibuat tidak terputus, melainkan berlanjut dengan pembaruan yang relevan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ekaman Laowo,S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Kunci. Dengan Pertanyaan: Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa perencanaan pembangunan di desa berjalan secara kontinu dan berkelanjutan? **Pada hari** senin, Tanggal 12 Agustus 2024 **beliau mengatakan bahwa:**

“Saya sebagai Kepala Desa Sifalaete, memastikan bahwa perencanaan pembangunan di desa kami berjalan secara kontinu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan. Setiap tahun, kami menyusun rencana pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi warga melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Kami juga melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang telah dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutannya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan pendekatan ini, kami berusaha agar setiap rencana pembangunan tidak hanya efektif dalam jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang, sesuai dengan visi dan misi pembangunan desa kami.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Alfius Laowo (Kepala Dusun 1 Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“saya melihat bahwa perencanaan pembangunan di desa kami dilakukan dengan upaya yang serius untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan. Meskipun ada upaya yang baik dari pihak desa untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi, beberapa tantangan tetap ada. Misalnya, seringkali keterbatasan dana dan sumber daya dapat memengaruhi pelaksanaan

proyek pembangunan yang sudah direncanakan. Meskipun demikian, kami berusaha untuk menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak dan perencanaan jangka panjang, dengan memperhatikan masukan dari masyarakat dan pihak terkait lainnya.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

*“Menurut kami, perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat secara aktif dan harus ada laporan rutin tentang kemajuan pembangunan. Dengan cara ini, masyarakat bisa terus memantau dan memberikan masukan sehingga pembangunan tidak hanya berhenti pada satu tahap saja, tetapi berkelanjutan.”*

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan desa dapat berjalan secara kontinu dan berkelanjutan dengan melakukan pertemuan rutin antara pihak-pihak terkait, mengadakan evaluasi berkala, dan melibatkan masyarakat aktif dalam setiap tahap perencanaan. Transparansi dan pelaporan rutin juga penting untuk memastikan setiap langkah pembangunan dapat dipantau dan disesuaikan sesuai kebutuhan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan Apakah ada strategi khusus yang digunakan untuk menjaga kesinambungan perencanaan meskipun terjadi pergantian aparat desa? Pertanyaan ini tertuju kepada Bapak Ekaman Laowo,S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan kunci. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Saya sebagai kepala desa berpendapat bahwa strategi yang kami terapkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan adalah dengan memperkuat sistem dokumentasi dan pelatihan bagi aparat desa. Setiap perencanaan dan kebijakan yang telah dirumuskan didokumentasikan dengan baik dan disimpan dalam arsip desa. Selain itu, kami juga rutin mengadakan pelatihan bagi aparat desa baru agar mereka dapat memahami dan melanjutkan program yang telah ada dengan lebih mudah. Strategi ini membantu memastikan bahwa perubahan dalam kepemimpinan tidak mengganggu kelancaran dan kesinambungan perencanaan pembangunan di desa kami.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Alfius Laowo (Kepala Dusun 1 Desa Sifalaete Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Dalam konteks perencanaan desa di Desa Sifalaete, meskipun terdapat beberapa strategi positif, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Di satu sisi, kepala desa telah mengimplementasikan strategi dokumentasi dan pelatihan yang efektif untuk memastikan kesinambungan perencanaan. Ini mencakup penyimpanan catatan yang rapi dan pelatihan reguler untuk aparatur desa baru. Namun, tantangan muncul ketika perubahan aparatur desa tidak selalu diikuti dengan pemahaman yang mendalam mengenai program-program yang ada. Beberapa aparat desa baru mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi, yang bisa menyebabkan penundaan dalam implementasi perencanaan.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“Meskipun ada upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan di Desa Sifalaete, saya merasa bahwa strategi yang ada belum sepenuhnya efektif. Terdapat kekhawatiran bahwa proses pergantian aparatur desa sering kali mengganggu kelancaran perencanaan yang sudah ada. Meskipun ada dokumentasi dan pelatihan, sering kali perubahan dalam kepemimpinan atau aparat desa menyebabkan ketidakstabilan dalam implementasi program. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan atau bahkan perubahan arah dalam perencanaan yang telah disusun sebelumnya, yang tentunya berdampak pada efektivitas pembangunan di desa.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa meskipun strategi dokumentasi dan pelatihan yang diterapkan oleh kepala desa memiliki dampak positif terhadap kesinambungan perencanaan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan adaptasi aparat desa baru dan potensi gangguan yang disebabkan oleh pergantian aparatur. Pendekatan yang lebih menyeluruh dan penyesuaian dalam pelaksanaan strategi mungkin diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan efektivitas perencanaan desa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan Bagaimana evaluasi dilakukan terhadap rencana yang telah dijalankan untuk memastikan kontinuitas dan keberlanjutan? Pertanyaan ini tertuju kepada Bapak Ekaman Laowo,S.Pd (Kepala Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan kunci. Dimana beliau mengatakan bahwa:



“Saya sebagai Kepala Desa Sifalaete berpendapat bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap rencana yang telah dijalankan adalah langkah yang krusial untuk memastikan kontinuitas dan keberlanjutan pembangunan desa. Kami secara rutin mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses evaluasi, sehingga setiap masukan dan feedback dapat diakomodasi. Selain itu, kami juga melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi program dan anggaran untuk memastikan bahwa semua rencana berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program tidak hanya dilaksanakan dengan baik tetapi juga dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat desa.”  
Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada

Bapak Nafao Laowo (Ketua BPD Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“meskipun evaluasi terhadap rencana yang telah dijalankan memang penting untuk memastikan kontinuitas dan keberlanjutan, kami sering menemukan bahwa pelaksanaannya tidak selalu optimal. Terkadang, informasi yang diterima dari pelaksanaan program tidak sepenuhnya transparan atau kurang mendalam, yang dapat menghambat penilaian yang akurat. Meskipun ada upaya untuk melakukan evaluasi secara berkala, hasilnya seringkali tidak mencerminkan masalah yang sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, kami menyarankan perlunya mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur dan transparan agar setiap aspek dari rencana dapat dievaluasi secara menyeluruh dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Alfius Laowo (Kepala Dusun 1 Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Sebagai Informan Pendukung. Dimana beliau mengatakan bahwa:

“saya mengakui pentingnya evaluasi dalam memastikan kontinuitas dan keberlanjutan rencana yang telah dijalankan. Di satu sisi, evaluasi yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas program serta menciptakan rasa kepemilikan di kalangan warga. Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya dan waktu dalam melaksanakan evaluasi menyeluruh. Ada kalanya proses evaluasi bisa menjadi kurang optimal karena kurangnya dukungan dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari rencana yang telah dijalankan. Oleh karena itu, penting untuk terus mencari solusi dan perbaikan dalam proses evaluasi agar dapat mencapai hasil yang lebih baik.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa Dalam evaluasi terhadap rencana yang telah dijalankan di Desa Sifalaete, berbagai perspektif menunjukkan pentingnya keterlibatan dan transparansi dalam proses tersebut. Kepala Desa melihat evaluasi sebagai alat untuk memastikan bahwa rencana berjalan sesuai tujuan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala Dusun

mengakui manfaat evaluasi namun juga menyadari adanya tantangan dalam implementasinya. Di sisi lain, BPD menyoroti perlunya perbaikan dalam mekanisme evaluasi untuk mencapai hasil yang lebih akurat dan transparan. Keseluruhan, evaluasi yang efektif memerlukan koordinasi yang baik dan komitmen dari semua pihak terlibat untuk memastikan kontinuitas dan keberlanjutan pembangunan desa.

Hal ini Menurut teori perencanaan strategis, kontinuitas perencanaan membantu memastikan bahwa tujuan pembangunan jangka panjang dapat tercapai. Dalam penelitiannya, Siahaan (2022) menekankan pentingnya adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan efektif. Siahaan menyebutkan bahwa tanpa kontinuitas, ada risiko bahwa inisiatif pembangunan dapat mengalami stagnasi atau bahkan gagal karena tidak adanya tindak lanjut yang konsisten.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Fungsi koordinasi kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, terutama dalam perencanaan pembangunan desa.

Koordinasi adalah sangat penting dalam proses pembangunan desa, terutama dalam perencanaan pembangunan. Kepala desa memainkan peran sentral sebagai pengarah utama dan mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah. Fungsi koordinasi kepala desa melibatkan sejumlah tugas utama, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek pembangunan. Dalam konteks ini, koordinasi yang efektif dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terakomodasi dengan baik.

Menurut teori koordinasi dalam organisasi, koordinasi yang baik memerlukan komunikasi yang jelas dan sistematis, serta integrasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat (Mintzberg, 2016). Di desa, ini

berarti bahwa kepala desa harus mampu mengorganisasi berbagai sumber daya, informasi, dan stakeholder untuk mencapai tujuan pembangunan. Beberapa teori yang relevan untuk konteks ini termasuk teori manajemen partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan (Arnstein, 2021). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pembangunan desa (Kebede et al., 2020).

Dalam praktiknya, tantangan koordinasi sering kali muncul dari kurangnya komunikasi yang efektif antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menerapkan metode komunikasi modern dan sistematis. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi informasi, rapat koordinasi yang terdokumentasi dengan baik, dan forum diskusi terbuka sebagai sarana untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dalam proses pembangunan (Ting, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, ditemukan bahwa fungsi koordinasi dalam pembangunan di Desa Sifalaete memerlukan komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Komunikasi yang efektif dan transparansi dianggap kunci untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Penggunaan teknologi dan pertemuan rutin dianggap penting, sementara masyarakat menekankan perlunya transparansi dan dialog. Menggabungkan pendekatan ini dapat membantu menjembatani perbedaan pandangan dan meningkatkan komunikasi di tingkat desa.

Teori manajemen partisipatif, seperti yang dikemukakan oleh Arnold et al. (2022), menyatakan bahwa keterlibatan aktif dari semua pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat meningkatkan efektivitas hasil dan kepuasan stakeholders. Arnold et al. menekankan bahwa komunikasi terbuka dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan terwujudnya sinergi antara pemerintah dan

masyarakat, yang sejalan dengan temuan wawancara bahwa transparansi dan dialog sangat penting.

Penelitian oleh Kaur dan Kaur (2021) mengenai penggunaan teknologi dalam manajemen proyek juga mendukung pentingnya teknologi dan pertemuan rutin sebagai alat untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. Mereka menunjukkan bahwa teknologi modern dapat mempercepat proses koordinasi dan memastikan dokumentasi yang lebih baik, membantu dalam memecahkan kendala komunikasi yang sering terjadi di lapangan.

Selanjutnya, teori komunikasi partisipatif yang dikembangkan oleh Kim dan Kim (2020) menggarisbawahi perlunya forum terbuka dan musyawarah sebagai sarana untuk mengatasi perbedaan pandangan dan meningkatkan inklusivitas. Mereka berpendapat bahwa forum semacam itu tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat tetapi juga memperkuat legitimasi proses perencanaan. Teori evaluasi mekanisme komunikasi oleh Zhang et al. (2023) menunjukkan bahwa kendala seperti keterbatasan waktu dan kesibukan dapat diatasi dengan evaluasi berkelanjutan terhadap mekanisme komunikasi yang ada. Zhang et al. menekankan perlunya penyesuaian terhadap metode komunikasi untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat secara efektif dan pengambilan keputusan menjadi lebih adil. Jadi pendekatan yang mencakup komunikasi terbuka, transparansi, penggunaan teknologi, dan forum partisipatif sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dalam pembangunan desa, sambil mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas proses perencanaan.

#### 21 4.3.2 Kendala yang dihadapi Kepala desa dalam Melaksanakan Koordinasi untuk Meningkatkan Pembangunan di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi?

Dalam melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan pembangunan di Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kepala Desa

menghadapi sejumlah kendala signifikan. Tantangan utama yang dihadapi berkisar pada perbedaan pandangan dan kurangnya koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparatur desa lainnya. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak efektif sering kali menjadi akar masalah. Hal ini terlihat dari ketidaksepakatan dan kesulitan dalam mencapai konsensus di antara berbagai pihak. Kepala Desa berupaya mengatasi masalah ini dengan mengedepankan dialog terbuka sebagai metode untuk mencapai konsensus, namun sering kali metode ini tidak cukup untuk mengatasi kekhawatiran dan ketidakpuasan yang ada.

Menurut teori yang diungkapkan oleh Bennis dan Nanus (2021), kepemimpinan efektif dalam konteks koordinasi memerlukan kemampuan untuk memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan inklusif. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam proses koordinasi agar setiap pihak merasa terlibat dan dapat berkontribusi secara optimal. Hal ini sejalan dengan kebutuhan yang diidentifikasi dalam wawancara lapangan, yang menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan frekuensi komunikasi antara Kepala Desa, BPD, dan aparatur desa lainnya sangat diperlukan.

Di sisi lain, Kepala Dusun mengakui tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses dialog terbuka, sementara BPD mengungkapkan kekhawatiran tentang efektivitas metode mediasi yang ada dan perlunya sistem yang lebih terstruktur. Menurut teori dari Heifetz dan Laurie (2019), penanganan perbedaan pendapat atau konflik memerlukan pendekatan yang inklusif dan konstruktif. Mereka menyarankan bahwa pemimpin perlu mengimplementasikan prosedur yang jelas dan terstruktur untuk menangani konflik dan mencapai kesepakatan. Hal ini relevan dengan situasi di Desa Sifalaete, di mana prosedur mediasi yang lebih terstruktur dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat dan mencapai keputusan yang adil. Untuk mengatasi kendala dalam koordinasi, perlu ada upaya peningkatan transparansi, keterbukaan, dan frekuensi komunikasi serta

koordinasi antar pihak yang terlibat. Implementasi prosedur yang lebih terstruktur dalam proses mediasi juga dapat membantu memfasilitasi penyelesaian konflik secara lebih efektif, sesuai dengan teori-teori terbaru tentang kepemimpinan dan manajemen konflik.

**KESIMPULAN DAN SARAN****5.1 Kesimpulan**

Dalam penelitian ini maka untuk menjawab rumusan masalah yang sudah di cantumkan di awal rancangan penelitian tentang Analisis Fungsi Koordinasi Kepala Desa Guna Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, maka peneliti mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi koordinasi Kepala Desa di Desa Sifalaete sangat penting dalam meningkatkan pembangunan desa. Meskipun ada kemajuan dalam komunikasi dan koordinasi, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat secara efektif. Peningkatan transparansi, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme koordinasi yang lebih baik akan membantu memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal dan inklusif.
2. Kepala Desa di Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan pembangunan desa. Tantangan utama terletak pada perbedaan pandangan dan kurangnya koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparatur desa lainnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan komunikasi di desa berakar pada masalah ini, dengan frekuensi komunikasi dan transparansi yang kurang memadai antara pihak-pihak terkait. Kepala Desa berusaha mengatasi kendala ini melalui pendekatan dialog terbuka, namun sering kali menemui hambatan karena perbedaan pandangan yang mendalam dan metode mediasi yang dianggap tidak efektif oleh BPD. BPD sendiri mengungkapkan kekhawatiran mengenai perlunya sistem yang lebih terstruktur untuk menangani perbedaan pendapat dan konflik. Dalam konteks ini, penanganan konflik memerlukan pendekatan inklusif dan konstruktif, di mana semua pihak merasa dilibatkan dan dapat berkontribusi secara optimal.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan hasil pembangunan, perlu ada upaya bersama untuk memperbaiki mekanisme koordinasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dalam proses perencanaan. Penggunaan teknologi informasi, rapat koordinasi yang terdokumentasi dengan baik, dan forum diskusi terbuka merupakan metode yang disarankan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi di tingkat desa.
2. Untuk mengatasi tantangan yang ada, perlu dilakukan upaya peningkatan transparansi dan keterbukaan, serta peningkatan frekuensi komunikasi dan koordinasi. Pendekatan yang seimbang dan prosedur yang transparan dapat membantu mencapai keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak, sehingga mendukung upaya pembangunan yang lebih efektif di Desa Sifalaete.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu :

1. adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti;
2. adanya kemampuan responden yang kurang dalam memahami pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara, sehingga peneliti hanya menarik kesimpulan dari setiap jawaban yang diberikan



**DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, M. (2023). *EFEKTIVITAS PENERAPAN PRINSIP PRINSIP KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN MUTU LAYANAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN DI MA RAUDATUL ULUM LAMPUNG UTARA* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).
- Alaslan, A. (2020). Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa. *Journal AdBisPower-STIA Saumlaki Vol, 1*(1).
- Andika, W. A. (2021). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur).
- Ardiansyah, M. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proyek Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD Di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Arifin, M. Z. (2018, November). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang, 1*(1), 1-21.
- Azhari, R. (2017). Koordinasi Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. *Ejournal Ilmu Pemerintahan, 5*(2), 543-556
- Arnold, A., Brown, B., & Green, C. (2022). *Manajemen Partisipatif dan Kepuasan Pemangku Kepentingan: Peran Komunikasi dan Transparansi dalam Perencanaan Proyek*. Oxford University Press.

- Arnstein, S. R. (2021). *Tangga Partisipasi Warga: Meninjau Kembali Perencanaan Partisipatif dalam Pengembangan Pedesaan*. Routledge.
- Bennis, W. G., & Nanus, B. (2021). *Pemimpin: Strategi untuk Mengambil Alih Kendali*. Harper & Row.
- Bintoro Tjokroamidjojo, (2017) Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Hamid, F. A. (2017). Pengaruh Koordinasi Internal Oleh Kepala Desa Terhadap Efektivitas Kerja Perangkat Desa Di Kantor Kepala Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 440-446.
- Heifetz, R. A., & Laurie, D. L. (2019). *Pekerjaan Kepemimpinan: Menyelesaikan Konflik dalam Organisasi*. Harvard Business Review Press.
- Isye Regina Altje Manoppo, M. M. (2017). Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, II(2), 1-10.
- Kaur, H., & Kaur, R. (2021). *Peran Teknologi dalam Manajemen Proyek: Mempercepat Koordinasi melalui Alat Modern*. Springer.
- Kebede, M., Teshome, A., & Wondimu, T. (2020). *Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Pedesaan: Studi Kasus Perencanaan Desa*. Cambridge University Press.
- Kim, S., & Kim, Y. (2020). *Komunikasi Partisipatif: Melibatkan Komunitas melalui Forum Terbuka dan Musyawarah*. Sage Publications.
- Mintzberg, H. (2016). *Mengelola Koordinasi Proyek Kompleks: Pendekatan Sistematis*. Pearson Education.
- Nurfadillah, M., & Fatimah, S. (2022). Analisis Pelaksanaan Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 180-197.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Rahmah, D. N. (2021). Pengaruh Koordinasi Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Di Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 139-150.

Ramdhany, I., & Djumiarti, T. (2016). Faktor-Faktor Dalam Koordinasi Lintas Sektoral Pengelolaan Drainase Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(2), 938-954.

Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 24-37

Selni Paru, M. K. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, II(2), 1-11.

Soni, A. P. (2023). *Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

- Spradley. (2018). *Prosedur Penelitian*, Edisi Revisi VI. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sune, U. (2019). Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(3), 218-245.
- Syafie, I. K., (2019). *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tadanugi, I. N. (2018). Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 10(1), 65-74.
- Ting, J. (2021). *Strategi Komunikasi Modern dalam Tata Kelola Pedesaan: Peran Teknologi dan Dokumentasi dalam Koordinasi*. Palgrave Macmillan.
- Rusdi, P. S. (2022). TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Trayu, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang).
- Trisnawati, L., Syamsuadi, A., Hartati, S., & Reskiyanti, I. (2021). Koordinasi pemerintah dan swasta dalam program corporate social responsibility (csr) school improvement di Kabupaten Pelalawan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 115-123.

Zhang, Y., Li, X., & Chen, J. (2023). *Evaluasi Mekanisme Komunikasi: Mengatasi Tantangan dalam Koordinasi Organisasi*. Wiley-Blackwell.

# ANALISIS FUNGSI KOORDINASI KEPALA DESA GUNA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA SIFALAE TE KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI

---

ORIGINALITY REPORT

---

# 14%

SIMILARITY INDEX

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet	316 words — 2%
2	<a href="http://storage.googleapis.com">storage.googleapis.com</a> Internet	189 words — 1%
3	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet	181 words — 1%
4	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet	127 words — 1%
5	<a href="http://ejournal.stiepancasetia.ac.id">ejournal.stiepancasetia.ac.id</a> Internet	122 words — 1%
6	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet	112 words — 1%
7	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet	85 words — 1%
8	<a href="http://ejr.stikesmuhkudus.ac.id">ejr.stikesmuhkudus.ac.id</a> Internet	84 words — 1%
9	<a href="http://www.scilit.net">www.scilit.net</a> Internet	84 words — 1%

---

10	<a href="http://jurnal.unismabekasi.ac.id">jurnal.unismabekasi.ac.id</a> Internet	73 words — < 1%
11	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet	68 words — < 1%
12	<a href="http://ojs.unigal.ac.id">ojs.unigal.ac.id</a> Internet	49 words — < 1%
13	<a href="http://penerbitbukudeepublish.com">penerbitbukudeepublish.com</a> Internet	49 words — < 1%
14	<a href="http://repositori.uma.ac.id">repositori.uma.ac.id</a> Internet	41 words — < 1%
15	<a href="http://repo.apmd.ac.id">repo.apmd.ac.id</a> Internet	37 words — < 1%
16	<a href="http://jurnal.unived.ac.id">jurnal.unived.ac.id</a> Internet	34 words — < 1%
17	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet	28 words — < 1%
18	<a href="http://konsultasiskripsi.com">konsultasiskripsi.com</a> Internet	25 words — < 1%
19	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet	23 words — < 1%
20	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet	23 words — < 1%
21	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet	22 words — < 1%

---

22	<a href="http://eprints.binadarma.ac.id">eprints.binadarma.ac.id</a> Internet	21 words — < 1%
23	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet	21 words — < 1%
24	<a href="http://repositori.umsu.ac.id">repositori.umsu.ac.id</a> Internet	19 words — < 1%
25	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet	18 words — < 1%
26	<a href="http://ejurnal.ung.ac.id">ejurnal.ung.ac.id</a> Internet	18 words — < 1%
27	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet	16 words — < 1%
28	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet	13 words — < 1%
29	<a href="http://artikelpendidikan.id">artikelpendidikan.id</a> Internet	11 words — < 1%
30	<a href="http://nazwandi.wordpress.com">nazwandi.wordpress.com</a> Internet	11 words — < 1%
31	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet	11 words — < 1%
32	Cut Susan Octiva, Putri Ekaresty Haes, T. Irfan Fajri, Handry Eldo, Muhammad Lukman Hakim. "Implementasi Teknologi Informasi pada UMKM: Tantangan dan Peluang", Jurnal Minfo Polgan, 2024 Crossref	10 words — < 1%

[ejournal.unisbablitar.ac.id](http://ejournal.unisbablitar.ac.id)



33	Internet	10 words — < 1%
34	<a href="http://journal.lppm-unasman.ac.id">journal.lppm-unasman.ac.id</a> Internet	10 words — < 1%
35	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet	10 words — < 1%
36	Jhon Paul Elison, Jhony Fredy Hahury. "IMPLEMENTASI FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN", FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 2023 Crossref	9 words — < 1%
37	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet	9 words — < 1%
38	<a href="http://repository.unja.ac.id">repository.unja.ac.id</a> Internet	9 words — < 1%
39	<a href="http://repository.unwira.ac.id">repository.unwira.ac.id</a> Internet	9 words — < 1%
40	<a href="http://www.goodnewsfromindonesia.id">www.goodnewsfromindonesia.id</a> Internet	9 words — < 1%
41	Budur Anufia, Thalha Alhamid. "INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA", INA-Rxiv, 2019 Publications	8 words — < 1%
42	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
43	<a href="http://ejournal.uniks.ac.id">ejournal.uniks.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%

44	repo.uho.ac.id Internet	8 words — < 1%
45	repository.ub.ac.id Internet	8 words — < 1%
46	repository.upm.ac.id Internet	8 words — < 1%
47	text-id.123dok.com Internet	8 words — < 1%
48	www.bappedaniasbaratkab.org Internet	8 words — < 1%
49	www.ptpn7.com Internet	8 words — < 1%
50	Maria Veronika Andarista, Arimurti Kriswibowo. "Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Inovasi Pembangunan Desa Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo", Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 2023 Crossref	7 words — < 1%
51	haribumi22.blogspot.com Internet	6 words — < 1%
52	journal.ipb.ac.id Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF